

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adji, Oemar Seno. 1980. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Aji, Rihantoro Bayu. 2019. *Prinsip Hukum Perampasana Aset Koruptor dalam Prespektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Laksbang Justisia.
- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alhakim, Abdurrahman. 2019. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 3.
- Ardisasmita, M Syamsa. 2006. *Definisi Korupsi Menurut Prespektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta. 23 Agustus.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Arifin, Firdaus. Juli 2019. *Problematisa Hukum Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya*. Pagaruyuang Law Journal. Volume 3 Nomor 1.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi.
- Atmadja, Arifin P Soerja. 2005. *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- , 2016. *Pemikiran Romli Atmasasmita tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bawole, Grace Yurico. Oktober 2018. *Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability dan Vicarious Liability*. Lex Et Societatis. Volume VI Nomor 8.
- Candra, Deddy. 2018. *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Trnasnasional*. Jurnal BPPK. Volume 11 Nomor 1.

- Flemming, Matthew H. 2005. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonom Draft Comments*. London: University College.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hatta, Muhammad. 2019. *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Hayati. Nur. 2009. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257K/PID/2006)*. Lex Jurnalica. Volume 7. Nomor 1.
- Hendrik, Meray. 2006. *Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Volume V. Nomor 3. Maret.
- Hersriavita, Sara. 2019. *Upaya Pengembalian Kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS. Volume VII. Nomor 1. Januari-Juni.
- Husodo, Adnan Topan. 2010. *Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perampasan Aset Hasil TPK*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Kartanegara, Satochid. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.
- Kiltgaard, Robert. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Krisdianto. 2015. *Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang Kepemilikannya telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga*. E Journal Katalogis, Volume 3. Nomor 12. Desember.
- Krisnan, Johny. 2008. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Pahami Dulu Baru Lawan: Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- , 2020. *Laporan Tahunan KPK 2020*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifin, Ridwan. 2016. *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS). Volume 1. Nomor 1.
- Mahmud, Ade. Desember 2018. *Problematisa Asset Recovery dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial. Volume 11 Nomor 3.daftar
- Mawardi. 2015. *Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana*. Jurnal Ius. Volume III. Nomor 7. April.
- Mokobimbing, Desly. Mei 2015. *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*. Jurnal Lex Crimen. Volume IV Nomor 3.
- Molejatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 2003. *Kebijakan Criminal terhadap Cybercrime*. Majalah Media Hukum. Volume 1. Nomor 3. 22 Agustus.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Musahib, Abd Razak. Januari 2015. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. e-Journal Katalogis. Volume 3 Nomor 1.
- Pardede, R. 2015. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Ditinjau dari Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi. Dibuat untuk mendapatkan gelar doktor dalam Ilmu Hukum Unisba. Februari.
- Prakarsa, Aliyth. 2017. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris. Volume 6 Nomor 1.
- Prasasthi, SA. 2011. *Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Bantuan Hukum Timbal Balik untuk Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) terhadap Pengembalian Aset di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi (Stolen Asset Recovery)*. Jurnal Opinio Juris. Volume 2.

- Rajagukguk, Erman. 26 Juli. *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*. Disampaikan pada Diskusi Publik. Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Komisi Hukum Nasional (KHN) RI. Jakarta.
- Rizana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Riau: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Setiadi, Wicipto. 2018. *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 15. Nomor 3. November.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sangsi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjutak, Imanuel. 2016. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Saat Proses Penyidikan dan Kaitan Pelaksanaan Putusan Hakim (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn)*. Tesis. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. Januari 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Disampaikan pada Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Ekstradisi dan Bnatuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syauket, Amalia. 2021. *Buku Ajar: Pendidikan Anti Korupsi dalam Bingkai Pencegahan Menuju Indonesia Bebas Korupsi*. Bekasi Utara: Ubhara Jaya Press.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Thoyyibah, Imadah. Februari 2018. *Pendidikan Dasar Anti Korupsi dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam*. Menara Ilmu. Volume XII Jilid 1 Nomor 80.

- Toruan, Henry Donald Ibnu. Desember 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi*. Jurnal Rechtsvinding. Volume 3 Nomor 3.
- Wedha, Yogi Yasa. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Jurnal Analisis Hukum, Volume 1. Nomor 2. September.
- Widyopramono. 2014. *Peran Kejaksaan Terhadap Asset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Asas-Asas Perkembangannya Dewasa ini*. Kerjasama Mahupiki dan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 23-27 Februari.
- Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Yanuar, Purwaning M. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Zachrie, Ridwan dan Wijayanto. 2010. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap

Putusan Pengadilan

Sumber Lainnya

“Aset Koruptor mengapa harus disita”,
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, diakses pada 14 Juni 2021, 09.46 WIB.

Dwi Hadya Jayani, “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi yang Ditangani KPK Turun pada 2020”,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/31/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-yang-ditangani-kpk-turun-pada-2020>, 27 Juli 2021.

FJP Law Office, *Perubahan Definisi Delik Korupsi*, dikutip dari <https://fjp-law.com/id/perubahan-definisi-delik-korupsi/>, diakses pada Senin 7 Juni 2021, pukul 13.46 WIB.

“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, 2004-2020”, <https://lokadat.beritagar.id/chart/preview/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2004-2020-1611921280>, 12 Juli 2021.

Nur Syarifah, *“Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi”*, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>, 27 Juli 2021.

“Pohon Kerugian Keuangan Negara”, <https://shartika2009.wordpress.com/2011/04/24/pohon-kerugian-keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2021.

Pusat Edukasi Antikorupsi, *“Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia”*, <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/kasus-kasus-korupsi-di-indonesia>, 12 Juli 2021.

Tatang Guritno, *“ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp. 56,7 Triliun”*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/09/18483491/1cw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rps-567>, 12 Juli 2021.